

***SMART CITY : KONSEP KOTA CERDAS ERA KONTEMPORER
(STUDI KEBIJAKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP)***

***SMART CITY : CONTEMPORARY ERA OF SMART CITY CONCEPT
(STUDY OF SMART CITY POLICY IN SUMENEP DISTRICT)***

Oleh :

Imam Hidayat¹⁾ **, Hadi Soetarto²⁾

1) 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

Email: imamhidayat@wiraraja.ac.id¹⁾ **, Hadi18soetarto@gmail.com²⁾

Abstract

Along with the development of the digitalization era, requiring government agencies to take advantage of this potential as a medium in developing the region in a more advanced direction by ensuring the quality of services and good government resources, smart cities are a product of the program after the fall of the new order so that local governments have the power to regulate their regions. independently. The smart city concept itself is expected to be able to answer the challenges of the times along with the rapid world of technology, information or digitalization. It seems that smart cities have been used by local governments in Indonesia, including Sumenep Regency. This study uses a descriptive analysis design by using a qualitative approach to look for symptoms or empirical facts about the existence of a smart city policy in Semenep Regency using a theoretical focus from Pratama (2014), there are six indicators of Smart city success, namely as follows, Smart Economy, Smart People , Smart Governance, Smart Environment, Smart Living. The output that we plan is that it can be given a seminar in scientific academic studies

Keywords: *Smart City, Public Policy*

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, mengharuskan lembaga pemerintahan untuk memanfaatkan potensi ini sebagai media dalam membangun daerah ke arah lebih maju dengan menjamin kualitas pelayanan dan sumber daya pemerintahan yang baik, *smart city* adalah produk program pasca jatuhnya orde baru sehingga pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Konsep *smart city* sendiri diharapkan mampu menjawab tantangan jaman bersamaan dengan pesatnya dunia teknologi, informasi atau digitalisasi. Nampaknya *smart city* telah dipakai oleh pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan desain analisis deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif mencari gejala gejala atau fakta empirik tentang keberadaan kebijakan *smart city* di Kabupaten Semenep dengan menggunakan fokus teori dari Pratama (2014), terdapat enam indikator keberhasilan *smart city*, yaitu sebagai berikut, *Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Environment, Smart Living*. Adapun luaran yang kami rencanakan adalah dapat diseminarkan dalam kajian akademik ilmiah.

Kata kunci : *Smart City, Kebijakan Publik*

1. PENDAHULUAN

Bergantinya pemerintahan otoriter orde baru pada masa kepemimpinan presiden soeharto ke reformasi memberikan peluang tinggi bagi pemerintah saat ini untuk melakukan reformasi pemerintah yang mengarah pada perbaikan dan solusi sistem birokrasi yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan open government, pelajaran sejarah mencatat bahwa pada masa orde lama seringkali terjadi praktek penyelenggaraan pemerintah terhadap kebijakan yang diterapkan (Deni Fuzi 2017).

Perkembangan reformasi pemerintahan ini juga seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih sehingga berdampak positif bagi keseluruhan sektor kehidupan sosial khususnya dibidang peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya pemerintahan di masing masing daerah di Indonesia, reformasi birokrasi sendiri sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas tata Kelola pemerintah yang lebih maju (Ramli 2017), maka saat ini melalui otonomi daerah pemerintah dimasing masing wilayah berhak mengatur kotanya secara mandiri dan disesuaikan dengan ide dan gagasan dari pemerintahnya (Aldi Renaldi 2018). Kebijakan otonomi daerah sendiri menuntut peran aktif pemerintah untuk memberikan inovasi dan terobosan

terbaru dalam rangka merubah pemerintah kearah yang lebih maju (Fahrisyah 2020).

Berkembangnya teknologi informasi dan teknologi diterima oleh seluruh kalangan kelas masyarakat, kaya miskin, kota dan desa, tua dan muda (Alfi 2014), sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan sistem reformasi pemerintahan dan dapat mempermudah bagi pengguna dan penyedia layanan publik, sebenarnya perkembangan teknologi informasi sudah terjadi sejak lama namun hari ini khususnya perkembangan ini sudah mencapai titik maksimal, dimana kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang sudah mampu dikerjakan oleh mesin, kita menyebut perkembangan teknologi ini dengan dunia digitalisasi. Manusia memanfaatkan keberadaan teknologi dan informasi sebagai alat untuk memperbaiki kualitas hidup, pemerintahpun memanfaatkan keadaan ini sebagai langkah strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat (Widyaiswara 2017).

Dengan sentuhan teknologi digitalisasi yang pada awalnya pengetikan melalui mesin ketik namun hari ini sudah bisa dilakukan dengan sangat optimal oleh komputer yang memiliki kegunaan lebih luas, sehingga pelayanan hari ini lebih efektif dengan

hadirnya digitalisasi dan layanan internet. Keberadaan digitalisasi ini telah membawa banyak perubahan bagi kegiatan sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat saat ini (Chandra 2016).

Hari ini perkembangan teknologi informasi semakin luas sehingga keberadaan digitalisasi sudah menjadi ciri bergsernya masyarakat modern ke masyarakat digital yang memanfaatkan kekuatan teknologi informasi menjadi masyarakat digital, dulu kegiatan pemerintah yang banyak menggunakan pelayanan kertas namun hari ini sudah bisa dituntaskan dengan *soft file* dan *paperless*, ditambah dengan keberadaan pelayanan yang terkesan rumit, berbelit dan panjang sehingga terjadi praktek mal administasi.

Namun, saat ini dengan adanya digitalisasi pelayanan dan kegiatan administrasi sudah bisa diakses secara digital sehingga lebih efektif dan efisien. Publik yang ingin melakukan proses pendaftaran dan keperluannya sudah bisa dilalui dengan internet cukup melalui formulir online masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran secara cepat ditambah dengan kecanggihan smart phone dan komputer sudah bisa digunakan dimana saja kapanpun saja.

Maka seiring dengan berkembangnya teknologi ini pemerintah menangkap peluang ini sebagai momentum yang tepat dalam rangka

memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendukung kegiatan birokrasi dengan inovasi pelayanan yang semakin optimal, inovasi yang dimaksud mengarah pada perbaikan sistem kualitas tata Kelola yang lebih baik (suherman 2020).

Hari ini perkembangan teknologi di dunia intitusi dan birokrasi sudah semakin maksimal, keberadaan teknologi dan sistem informasi digunakan secara baik oleh pemerintah. Maka konsep besar pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas melalui teknologi informasi yang kreatif ini lahirlah produk pemerintah dalam rangka memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan sebutan *smart city* atau kota cerdas dengan segala akses kelebihan dan kecanggihan sistem informasi dan pelayanannya, *smart city* sendiri menghubungkan infrastruktur sosia, ekonomi dan infrastruktur fisik sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam pengembangan kota (Nurani 2017).

Ide dan konsep *smart city* telah diterapkan oleh negara negara diseluruh dunia sebagai kekuatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial masyarakat (Hudjolli 2017) sehingga pemerintah Indonesia ini sudah menerapkan konsep *smart city* sebagai upaya dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, kota kota besar dan kecil sudah menerapkan *smart*

city sebagai upaga pemerintah mengurangi pelayanan yang berbelit belit, lama menjadi sangat cepat dan bisa dinikmati layanannya dimanapun berada, pemerintah indonesia sendiri memanfaatkan keberadaan teknologi informasi ini untuk digunakan sebagai strategi dalam memberikan pelayanan yang menuju kualitas tinggi (Samsul 2020).

Keberadaan dari adanya *smart city* untuk memberikan pelayanan tanggap bagi masyarakat, pemerintah atau pemberi layanan juga dapat berinteraksi dengan masyarakat terkait sumbangsih masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pembangunan berkelanjutan dari kota sehingga mampu memperbaiki kualitas pembangunan kota ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan, keberadaan *smart city* akan berdampak pemaksimalan jasa pelayanan yang bermutu bagi masyarakat (Gunartin 2005). Maka tidak heran jika *smart city* hari ini menjadi program keunggulan pemerintah dalam memperbaiki kualitas pembangunan kota (Widodo 2020). Beberapa contoh penerapan konsep *smart city* di Indonesia :

1. *E-Government*
2. *E-Budgeting*
3. E-Wadul di Surabaya
4. Jakarta *Smart City Website*
5. *Command Center* di Bandung
6. *E-Village* di Banyuwangi

7. Portal Pengadaan Nasional oleh INAPROC

8. Layanan Paspor Online oleh Dirjen Imigrasi RI

9. Situs LAPOR oleh UKP- PPP (salah satu Unit Kerja Presiden) dan sebagainya

Kabupaten sumenep telah memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai upaya dalam rangka membangun kota menuju kualitas hidup yang lebih tinggi lagi, kota kota ini komitmen memberikan proses pelayanan yang bermutu bagi masyarakatnya. Melalui implementasi *smart city* kota kota ini diharapkan mampu memenuhi kualitas pelayanan yang semakin baik bagi pengguna jasa pelayanan, pemerintah kota akan sulit mencapai pelayanan yang berkualitas pelayanan tanpa memanfaatkan keunggulan dari teknologi dan informasi (Hermansyah 2018).

Tentunya *smart city* yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep ini memiliki kesulitan dan strategi khusus yang berbeda sehingga keberadaan *smart city* perlu dikaji lebih mendalam bagaimana dan seperti apa kegiatan pelaksanaan *smart city* sebagai program unggulan dari Kabupaten Sumenep

Smart city memiliki kelebihan khusus dibidang pemanfaatan teknologi bagi masyarakat kota, namun bagaimana bagi masyarakat desa dan masyarakat yang

masih belum mengenal dengan pesat tentang keberadaan teknologi dan informasi ini. Maka masalah masalah yang terdapat dalam kemampuan masyarakat dan mengoprasikan layanan teknologi ini menjadi ketertarikan khusus bagi peneliti bagaimana studi kebijakan *smart city* diberlakukan di kota tersebut. Dengan beberapa kelebihan da kekurangan fenomena tersebut peneliti tertarik mengambil judul " *Smart city* : Konsep Kota Cerdas Era Kontemporer (Studi Kebijakan *Smart City* di Wilayah Madura). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan kebijakan *smart city* di Kabupaten Sumenep. Adapun target yang ingin dicapai adalah publikasi di artikel bereputasi.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian *Smart city*

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya.

Smart city merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart) dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari

masyarakat kota tersebut. *Smart city* diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut definisi dan pengertian *smart city* dari beberapa sumber buku:

- a Menurut Caragliu, Del Bo dan Nijkmp (2009), *smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
- b Menurut Pratama (2014), *smart city* merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya.
- c Menurut Cohen (2014), *smart city* adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke

dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

- d. Menurut Muliarto (2015), *smart city* adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni.

Karakteristik *Smart city*

Menurut Hao, Lei dan Yan (2012), terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri *smart city*, yaitu:

- a. Interkoneksi antara bagian perkotaan, *smart city* menggabungkan antara *communication network*, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud.
- b. Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.
- c. Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan

dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik.

- d. Aplikasi ICT (Information and Communication Technology) terbaru, *smart city* teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.

1.2. Indikator *Smart City*

Menurut Pratama (2014), terdapat enam indikator *smart city*, yaitu sebagai berikut:

a. *Smart economy*

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian *smart city* pada bagian (dimensi) *smart economy* meliputi dua hal, yakni proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitive*). Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber

daya. Arah pembangunan sumber daya di suatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.

b. *Smart people*

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*). *Smart people* dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *smart city*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT seperti penerapan e-learning, pemanfaatan sistem informasi sekolah/perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi/bahas pembelajaran, dan lain-lain, adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, adanya peranan masyarakat

dalam pemanfaatan teknologi informasi.

c. *Smart governance*

Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. *Smart governance* terdiri atas tiga bagian sebagai berikut:

1. Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi *smart city* dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik (pembuatan KTP, SIM dan lain-lain), penyediaan layanan administrasi keuangan/pembayaran yang efektif, hemat waktu, dan otomatis (pembayaran listrik, air dan lain-lain), dan adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik.

3. Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas.

d. *Smart Mobility*

Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada *smart mobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang *smart*, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

e. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor *network* dan *wireless sensor network*, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database

sistem, *mobile computing*, sistem operasi, *paralel computing*, *recognition (face recognition, image recognition)*, *image processing*, *intellegence transport system*, dan beragam teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.

f. *Smart Living*

Pada *smart living* terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *smart living*, terdapat tiga buah sub bagian yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem *filtering/proxy*), CCTV yang terpasang ditempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas.

Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara

online dan mobile.

Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT/SDM yang kompeten.

Penerapan *Smart City*

Smart city merupakan konsep pembangunan suatu negara, daerah, ataupun kota yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Holmes (2010), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan penerapan *smart city*, yaitu:

a Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer seperti perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Adanya koneksi jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya menerapkan *smart city* pada suatu negara, daerah, ataupun kota. Karena dengan saling terkoneksi jaringan internet akan mempermudah segala aktivitas komunikasi, transfer data,

penyajian informasi, serta kemudahan dalam pelayanan publik.

- b Keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dalam penerapan konsep *smart city* keterbukaan informasi menjadi faktor penting. Karena dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dari sistem yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat menjadi pintar. Kemudian dalam menerapkan konsep *smart city* diperlukan juga stimulasi di bidang ekonomi seperti menciptakan lahan bisnis berbasis online, menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti aplikasi transportasi online, dan lain-lain.
- c Pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat. Pengembangan inovasi-inovasi dalam sisi teknologi informasi yang baru akan membuat suatu negara, daerah, atau kota akan mudah dalam menerapkan konsep *smart city*. Kreatifitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai penunjang penerapan konsep *smart city*. Karena output dari *smart city* adalah terciptanya pelayanan yang baik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan ditingkatkannya

- kreatifitas masyarakat maka akan berimplikasi pada pengembangan-pengembangan inovasi yang terus dilakukan yang dihasilkan dari ide-ide kreatif dari masyarakat.
- d Stimulasi terhadap sisi *enterprise* dan kewirausahaan. Syarat lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep *smart city* adalah dengan stimulasi dari sisi *enterprise* (bisnis) dan kewirausahaan. Salah satu metode stimulasi nya adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil menengah (UKM). Kemudian melalui pendidikan selain menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi, juga menumbuhkan mental-mental pengusaha kepada setiap peserta didiknya.
- e Tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif dan demokrasi. Dalam menerapkan konsep *smart city* maka diharapkan pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipatif terhadap aspirasi masyarakat. Dan juga pemerintah diharapkan mampu memperbaiki penerapan demokrasi nya sehingga akan dengan menerapkan dua hal ini kan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Dengan pemerintahan yang stabil maka akan semakin cepat pula konsep *smart city* dapat diwujudkan.
- f Keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam penerapan

konsep *smart city* ketiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi harus seimbang. Karena ketiga faktor tersebut akan mempermudah pengimplementasian konsep *smart city*. Metode untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut adalah dengan memanfaatkan kekuasaan untuk membuat regulasi yang mengarah kepada penyeimbang ketiga aspek tersebut.

Konsep Kebijakan

Kegiatan dengan mengacu pada pedoman-pedoman yang ada sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Kahya dan Zenju dalam Mursalim (2017), bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Sulitnya menentukan hasil dari kebijakan diakibatkan adanya dampak yang tidak ter-antisipasi sebelumnya. Sementara menurut Dwijowijoto dalam Susila (2016), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan bisa mencapai tujuannya, yang diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program maupun melalui turunan formulasi kebijakan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan

Ada banyak model implementasi menurut para ahli. Gerston dalam Baedhowi (2009:2007) mengemukakan

ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi :

- a Pelaksana dalam menerjemahkan dan melaksanakan keputusan yang dibuat pengambil keputusan
- b Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan.
- c Kuantitas pelaksana yang sesuai dan tidak terlalu banyak.
- d Akuntabilitas pelaksana kebijakan. Berbeda dengan Gerston, menurut Grindle dan Thomas dalam Baedhowi (2009:28), faktor yang mempengaruhi kebijakan meliputi politik, finansial, manajerial, serta kualitas kemampuan teknis para pelaksana.

Sementara menurut Edward III dalam Kireina (2017)[8] indikator implementasi kebijakan meliputi: (1) Komunikasi, merupakan salah satu faktor yang menentukan implementasi kebijakan, yang mana implementasi yang efektif dapat terwujud apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Indikator komunikasi meliputi: (a) Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik maka akan menghasilkan implementasi yang baik; (b) Kejelasan, artinya komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan; (c) Konsistensi, artinya perintah yang diberikan harus jelas dan konsisten. (2) Sumber daya, meliputi (a) Sumber daya

manusia; (b) Sumber daya kewenangan; (c) Sumber daya anggaran; (d) Sumber daya peralatan. (3) Disposisi, merupakan sikap yang timbul dari para pelaku kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Jika pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan berhasil, begitupun sebaliknya; (4) Birokrasi, memiliki dua karakteristik yaitu (a) SOP, merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Mursalim, 2017), (b) fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif Locke, Spriduso dan Silferman (dalam Creswell,1994) mengungkapkan bahwa “*qualitative research is interpretative research. As such, the biases, values and judgement of the researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considering to be useful and positive*”. Serupa dengan pernyataan Moleong

(2008) mengutarakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah keseluruhan tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati secara mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif sendiri lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data”. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah empat Pemerintah Kabupaten Sumenep), Adapun fokus teori yang diambil adalah pendapat Pratama (2014), terdapat enam indikator keberhasilan *smart city*, yaitu sebagai berikut, *Smart Economy*, *Smart People*, *Smart Governance*, *Smart Environment*, *Smart Living*.

Keseluruhan data dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskripsi secara mendalam untuk memahami arti (*meaning*) dan mengerti secara faktual (*verstehen*) terhadap kondisi empirik yang sesungguhnya dengan beragam variasi empirik dari obyek penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh melalui potret empirik didekatkan dengan teori yang relevan untuk dilakukan interpretasi dalam usaha mengetahui derajat perkembangan faktual dari obyek penelitian diketahui batasan cangkauan kemampuan teori dalam menjelaskan perkembangan fakta empirik yang ada dan keterbatasan fakta yang ada dalam

memenuhi patokan teori yang ada (Bungin, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Smart Economy*

Smart economy dalam indikator keberhasilan *smart city* bukan suatu konsep yang baru, banyak contoh kota cerdas yang sudah digagas oleh pemerintah daerah di Indonesia misal Kota Surabaya, atau Kabupaten Banyuwangi dan kota-kota di wilayah Indonesia sudah menggunakan indikator ini sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang tepat, maka tidak heran jika banyak kota-kota yang sudah mandiri secara ekonomi yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Pada umumnya melalui *smart economy* ini pemerintah mengaktifkan UMKM yang dimiliki sehingga mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga, pemerintah Kabupaten Sumenep rajin melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada setiap masing-masing kecamatan diseluruh Wilayah Sumenep untuk berinovasi mengembangkan usaha produksinya agar bisa dikenal lagi lebih luas bukan hanya di desa atau di dalam kota.

Dalam *smart city* ini pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pendampingan secara intens

bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam membantu mempromosikan produknya melalui digital, seperti yang dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang diambil dari sumber e-sakip (sistem akuntabilitas kinerja industri pemerintah) berupaya memberikan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola produksi masyarakat melalui digitalisasi yaitu program pengembangan industri kecil menengah adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri sebagai berikut :

1. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Industri Pengolahan Hasil Laut seperti Kerupuk Ikan, Pembuatan Terasi, Pemindangan Ikan, Pengolahan Rumput Laut, Pengolahan Abon Ikan, kerajinan dari Kerangkerangan, Pengolahan Garam, Petis Ikan.
2. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis One Village One Product (OVOP) Industri Berbasis Kayu (Wood Working) seperti Ukiran Kayu, Meubel, Komponen Bahan Bangunan, Pertukangan Kayu, Warangka Keris, Kerajinan Perahu
3. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Industri Kreatif Industri

- Berbasis Logam seperti Keris, Pande Besi, Peralatan Dapur, Etalase, Las, Genteng, Bata Merah
4. Industri Berbasis Aneka Industri seperti Batik, Konveksi, Bordir, Penjahitan, Alaskaki,
 5. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Agro Industri Penolahan Pangan seperti Kripik Singkong, Kripik Sukun, Kripik Pisang, Kripik Jamur, Minyak Kelapa, Gula Siwalan, Dodol, Kamboya, Beras Poles

Temuan di atas merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sumenep dalam menyediakan produksi lokal yang mampu bersaing dengan pasar global yang dapat diterima oleh masyarakat luas baik didalam kota sendiri maupun diluar Kabupaten Sumenep.

2. *Smart People*

Smart people merupakan indikator penting dalam pelaksanaan *smart city*, dari indikator ini pembangunan ide dan konsep akan terwujud. Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan upaya perbaikan dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Melalui kerjasama dengan stakeholder kelembagaan seperti akademik, pihak organisasi kemasyarakatan juga didorong untuk berkontribusi dalam

memikirkan kemajuan pembangunan Kota Sumenep. Misal dari indikator akademik Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) ikut memberikan kesempatan bagi pihak akademisi dalam rangka membantu merumuskan ide dan gagasan untuk merekomendasikan kebijakan baik dibidang pendidikan, pengembangan industri masyarakat, pemanfaatan teknologi dan peningkatan sumberdaya melalui pendidikan dibidang perbaikan pengajaran yang berkualitas adalah salah satu agenda pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyiapkan dan mendukung berjalannya *smart city* di Kabupaten Sumenep.

Kunci keberhasilan dari *smart people* ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif dan berkolaborasi dalam proses pembanguna kota yang mengarah pada kesejahteraan dan pembangunan. Misal yang dilakukan oleh dinas pemerintah desa Kabupaten Sumenep yang inten berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa untuk terus mengembangkan potensi desa baik pada bidang pariwisata, industri maupun pendidikan agar bisa mencapai desa mandiri dan tegguh secara

ekonomi. Hal ini terbukti dengan partisipasi kelembagaan desa yaitu wisata mangrove kedatim di Desa Kebundadap Kecamatan Saronggi menjadi desa unggul di Jawa Timur yang juga berpotensi memberikan sumbangan PAD kepada kabupaten. Hal ini perlu terus digalakkan di setiap masing masing desa di Kabupaten Sumenep agar masyarakat mulai menyadari bahwa ada banyak potensi desa yang perlu dikembangkan. Kecerdasan dalam hal ini salah satu upaya dalam rangka mendorong *smart city* di Kabupaten Sumenep

3. *Smart Governance*

Smart governance merupakan instrumen dalam rangka menghasilkan kebijakan dan regulasi yang inovatif, melalui pemerintah yang baik akan mampu merubah daerah ke arah pembangunan yang lebih maju.

Kabupaten Sumenep melalui kepala daerah yang baru terus memberikan penyegaran yang inovatif dalam meningkatkan pembangunan kota, perbaikan tata kota, dan perbaikan kualitas pelayanan merupakan salah satu upaya dalam melayani publik.

Selaim itu pemerintah Kabupaten Sumenep memfasilitas perubahan dan berkembangnya sosial masyarakat misal melalui kebijakan atau regulasi peningkatan ekonomi strategis dan

pengembangan UKM dan industri kreatif dengan disediakannya akses teknologi oleh dinas industri dan perdagangan melalui web intansinya akan mengurangi campur tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, inti dari smart governance ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

4. *Smart Environment*

Smart environment di Kabupaten Sumenep berupaya memberikan tata ruang kota yang cerdas, dibangunnya taman tajamara dan perbaikan taman adipura dengan disediakan WIFI adalah upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk nyaman dalam beraktifitas. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dari smart environment ini misal lingkungan yang tercemar di beberapa wilayah pinggir pantai karena dibangunnya beberapa perusahaan tambak udang berdampak buruk bagi masa depan nelayan karena dampak dari pencemaran limbah udang yang mengganggu terhadap ekosistem dan hasil tangkapan ikan bagi nelayan misal daerah desa legung dan sekitarnya.

Beberapa kekurangan dari smart environment ini misal penggalian fosfat di beberapa titik yang dianggap akan mengganggu terhadap kenyamanan pemukiman warga sekitar misal desa

lenteng dan batuputih yang terus menerus digali tanah dan bebatuannya akan rentan terjadi longsor pada saat tertentu hal ini akan mengganggu terhadap lingkungan kenyamanan warga.

5. *Smart Living*

Pemerintah kabupaten sumenep berupaya memberikan memenuhi kebutuhan masyarakat misal dibidang kesehatan dengan memperbaiki kualitas SDM tenaga medis disetiap masing masing desa dengan pelayanan dan ketersediaan obat yang baik. Selain itu dibidang informasi pemerintah melakukan pendampingan dan pelatihan bagaimana memanfaatkan media digitalisasi sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah sumenep memberikan bantuan fasilitas pada bidang pertanian dan peternakan guna membantu masyarakat dalam mendapatkan hasil yang berkualitas.

Smart living ini menitik beratkan pada kegiatan pemenuhan keseluruhan dari aktifitas indikator diatas dalam menyediakan kegiatan pelayanan dan jasa bagi publik, sehingga publik merasa memiliki pemerintah yang selalu ada dalam setiap pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu pemerintah selalu mengontrol setiap bidang pelayanan publik sehingga dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi

ketersediannya kebutuhan publik. Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi setiap bidang pada pelayanan jasa dan pelayanan di harapkan mampu dengan tanggap memberikan informasi hal hal yang perlu segera untuk ditangani dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik.

5. PENUTUP

1. *Smart Economy*

Pemerintah lebih intens dalam mendorong terciptanya kegiatan perekonomian dengan pemanfaatan digital

2. *Smart People*

Kegiatan kolaborasi dengan stakeholder sebagai sarana dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan kota dengan pemanfaatan teknologi dan informasi agar menemukan ide dan rancangan bagi kemajuan Kabupaten Sumenep

3. *Smart Governance*

Perbaikan kualitas pelayanan baik manajerial atau pelayanan akses informasi publik terus dibangun dan dijaga agar tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin tinggi

4. *Smart Environment*

Perlu ada alternatif dan solusi yang tepat dalam mencegah masalah lingkungan di Kabupaten Sumenep

dengan tetap berpedoman pada pentingnya analisis dampak lingkungan

5. *Smart Living*

Keseluruhan dari kewajiban ketersediaan barang publik dan jasa pelayanan agar tetap dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan setiap kebutuhan dari masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjita, Utama Andri (2017). E-Government Sebagai Bagian Dalam *Smart city*. 2nd Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2017. ISSN: 2579-9045 ISBN: 978-602-74355-1-3.
- Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Pelita Insani: Semarang.
- Bahri, Syamsul dkk (2020) Implementasi Kebijakan *Smart city* Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Tangerang. JURNAL PAPTUNG: Vol. 3 No. 3 ISSN: 2715-0186.
- Bungin, M. B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group.
- Caragliu, A. & Del Bo, C. & Nijkamp, P. 2009. Smart cities in Europe. Serie Research Memoranda 0048, VU University Amsterdam.
- Cohen, Boyd. 2013. What exactly a smartcity?. www.boydcohen.com.
- Gunartin. (2018) Analisa Faktor-Faktor Kendala Ketercapaian Smart Mobility Dalam Upaya Menuju Konsep *Smart city* (Studi Pada Kota Tangerang Selatan), Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Vol 5. No 2. P-ISSN 2356-2005 E-ISSN 2598-4950

- Hao, L., Yan, Z. dan ChunLi, Y. 2012. The application and implementation research of *smart city*. China: System Science and Engineering (ICSSE).
- Holmes. 2010. *The Smart city, an Introduction*. U.K: House London.
- Hudjolly. (2017) Epistemologi dalam Kebijakan Publik: Kajian Konsep *Smart city* di Indonesia. Untirta Civic Education Journal, ISSN : 2541-6693 e-ISSN : 2581-0391 UCEJ, Vol. 2 No. 1, Hal. 31-48
- Kireina, N. F. (2017). Mesin parkir elektronik sebagai wujud dari *smart city* di kota bandung. JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017.
- Kireina, Nurani Fitri. (2017) Mesin Parkir Elektronik Sebagai Wujud Dari *Smart city* Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISPO). Vol 7, No 2.
- Muliarto, H. 2015. Konsep *Smart city* Smart Mobility. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi.
- Nurmawan , Aldi Rinaldi. Dkk (2019) Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan *Smart city* Kota Bandung. Prosiding Industrial Resiarch Workshop and Nasional Seminar. Vol 10 No 1
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2014. *Smart city* Beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya. Bandung: Informatika.
- Ramdani, Deni Fauzi. Fikri Habibi (2017) Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program *Smart city* di Kota Bandung, Seminar Nasional Riset Terapan 2017 SENASSET 2017 Serang.
- Ramli, Muhammad. (2017) Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2
- Septiarika, Fahrissy Tiko. Enny Suryanjari (2020). Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama *Smart city* Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019. Available online at: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks> Khazanah Sosial, Vol. 2 No. 3: 141-154
- Suherman, Diki. (2020) Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung. POLITICON: Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.1; Hal 75 – 86 website: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> ISSN: 2685-6670 (Online)
- Utomo, Chandra Eko Wahyudi. Mochamad Hariadi (2016) Strategi Pembangunan *Smart city* dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol.4, No. 2 Oktober 2016
- Wanto, Alfi Haris. (2017) Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep *Smart city*. JPSP (Journal of Public Sector Innovations). Vol 2, No 1
- Wibowo, Hermansyah Andi (2018). Model Of Academic Role In Supporting *Smart city* Implementation In Serang City Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 29-42 p-ISSN: 2597-4971.
- Widodo. Aan (2020). Strategi Komunikasi dalam Program Bekasi *Smart city*. DOI: 10.21111/ejoc.v5i1.3454. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342156879>